

**LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**Contoh Surat Laporan Kehilangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI
Selaku Ketua TIM TPKN**

KOP SURAT PENGADILAN

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
Selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami kami beritahukan, bahwa barang/kendaraan dinas berupa
....., Jenis/Merk :, Tahun Pembuatan, Nomor Polisi :
....., yang digunakan oleh :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah hilang. Atas peristiwa tersebut tindakan yang telah kami lakukan adalah :

1. Melaporkan kepada pihak yang berkepentingan.
2. Melakukan pemeriksaan.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk proses penyelesaian kehilangan barang/kendaraan dinas, bersama ini kami lampirkan bukti – bukti pendukung antara lain :

1. Surat laporan kehilangan barang/kendaraan dinas dari pemegang barang/kendaraan, kepada atasan langsung/Ketua Pengadilan.
2. Surat Penunjukan pemegang barang/kendaraan dinas.
3. Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dari kepolisian.
4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian.
5. Gambar / Denah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
6. Surat Pernyataan Bertanggungjawab dari pemegang barang/kendaraan dinas.
7. Surat Penunjukan/Pembentukan Tim Pemeriksa dari Satker.
8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pemeriksa dari Satker.
9. Fotocopy STNK dan BPKB Kendaraan Dinas.
10. Surat Taksiran Harga atas barang/kendaraan dinas yang hilang, dari Dinas Pendapatan Daerah – Unit Pelayanan PKB–BBN-KB di Propinsi/Kabupaten/Kecamatan.
11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,.
12. Surat Pernyataan Keberatan.
13. Surat Kuasa Khusus Pengalihan Hak dari yang bersangkutan, yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-.
14. Surat Penyerahan Jaminan
15. Surat Kuasa untuk melelang
16. Surat Kuasa Pematongan Gaji/Penghasilan.
17. Fotocopy surat pembayaran kerugian negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423922 – Pendapatan Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara, beserta Fotocopy NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) atau Bukti pematongan angsuran melalui SPM yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran (melalui pematongan gaji), bila sudah ada pembayaran angsuran.
18. Daftar Kerugian Negara

Demikian pemberitahuan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan untuk proses Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pejabat/Pegawai bersangkutan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan

TANDA TANGAN + STEMPEL

NIP.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi

**LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

Contoh Surat Pernyataan Bertanggungjawab (SPB)

KOP SURAT PENGADILAN

SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya selaku penanggungjawab kendaraan dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi :, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

Jenis :
Type :
Merek :
Isi Silinder :
Tahun Pembuatan :

Selanjutnya di hadapan Ketua Pengadilan, tertanggal menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saya selaku penanggungjawab kendaraan dinas dengan Nomor Polisi :, bertanggung jawab penuh atas peristiwa hilangnya kendaraan dinas tersebut pada hari, tanggal, sekitar pukul di, Jln., kelurahan, kecamatan, kabupaten
- Bahwa saya selaku penanggungjawab kendaraan mengakui sepenuhnya kelalaian saya atas peristiwa kehilangan kendaraan dinas tersebut.
- Bahwa saya selanjutnya akan mempertanggungjawabkan kelalaian saya atas terjadinya kerugian negara tersebut diatas.

Demikian Surat Pernyataan Bertanggungjawab ini saya buat dihadapan Ketua Pengadilan, dengan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga.

Diketahui oleh :
Ketua Pengadilan

.....20....
Yang membuat pernyataan,

TANDA TANGAN DIATAS MATERAI Rp.
6.000,-

NIP.

NIP.

**LAMPIRAN III
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

Contoh Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

KOP SURAT PENGADILAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan bahwa dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian negara / kekurangan perbendaharaan sebesar Rp.,- (.....) atau senilai kendaraan dinas roda 4 (empat) milik negara yang hilang, yang dalam hal ini disebabkan karena kelalaian saya :

1. Jumlah kerugian / kekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah uang sebesar Rp.,- (.....) ke Kas Negara di pada tanggal
2. Jumlah kerugian / kekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, dengan ketentuan sebagai berikut : yaitu mengangsur setiap bulan dari pemotongan langsung terhadap penghasilan tetap saya berupa gaji dan atau remunerasi (Surat Kuasa terlampir) dan dengan jaminan berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB Nomor :
 - b. Nilai : Rp.,- (.....).
 - c. Atas nama pemilik :
 - d. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dengan spesifikasi :
 1. Merk :
 2. Type :
 3. Jenis :
 4. Tahun Pembuatan :
 5. Isi Silinder :
 6. Warna :
 7. No. Rangka :
 8. No. Mesin :
3. Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya setelah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan perbendaharaan yang berlaku. Keterangan diatas tidak menutup kemungkinan :
 - a. bahwa negara dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal – hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan negara membebaskan saya dari pertanggungjawaban.
 - b. bahwa negara masih dapat menghapuskan kerugian negara/kekurangan perbendaharaan dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar, apabila setelah keterangan ini diberikan ternyata bahwa kekurangan dimaksud dapat diperhitungkan dengan kelebihan - kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian atau kealpaan.
 - c. bahwa dalam pertanggungjawaban, bersama saya dapat diberi pembayaran kembali apa yang telah dibayar oleh saya lebih dari apa yang seharusnya dibebankan kepada saya.
 - d. bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan yang berlaku.

.....20....

Mengetahui/menyetujui :
Panitera / Sekretaris
Pengadilan

Yang membuat pernyataan,

TANDA TANGAN + STEMPEL

TANDA TANGAN DIATAS
MATERAI Rp. 6.000,-

NIP.

NIP.

Saksi – Saksi : 1.

2.

**LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

Contoh Surat Kuasa Khusus Pengalihan Hak

KOP SURAT PENGADILAN

SURAT KUASA KHUSUS PENGALIHAN HAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terhitung setelah waktu ¹⁾ sejak ditandatanganinya Surat Kuasa Khusus Pengalihan Hak ini, memberi kuasa dengan tidak akan menarik kembali kepada ²⁾, untuk mengalihkan hak atas benda – benda jaminan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Kuasa Khusus Pengalihan Hak ini / sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat tanggal, guna mengembalikan kerugian negara/kekurangan perbendaharaan sebesar Rp.,- (.....) yakni kerugian / kekurangan disebabkan karena kelalaian saya.

Selanjutnya Surat Kuasa Khusus Pengalihan Hak ini tidak berlaku bila :

- a. Negara telah membebaskan saya dari pertanggungjawaban;
- b. Negara telah menghapus kerugian negara/kekurangan perbendaharaan tersebut dikarenakan pengaruh alam, pencurian, rusak, hilang diluar kesalahan, kelalaian atau kealpaan;
- c. Pembayaran yang dibebankan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal, telah terselesaikan.

Mengetahui/menyetujui :
Panitera / Sekretaris
Pengadilan

TANDA TANGAN + STEMPEL

NIP.

.....20.....
Yang membuat pernyataan,

TANDA TANGAN DIATAS
MATERAI Rp. 6.000,-

NIP.

Keterangan :

¹⁾ Sesuai kesanggupan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;

²⁾ Kepala Kantor/Satuan Kerja terjadinya kekurangan perbendaharaan/kerugian negara tersebut.

**LAMPIRAN V
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**Contoh Surat Penyerahan Jaminan
KOP SURAT PENGADILAN**

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal, dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak – hak atas barang, surat berharga, hak – hak atas tagihan berupa :

- a. 1 (satu) buah BPKB Nomor :
- b. Nilai : Rp.,- (.....).
- c. Atas nama pemilik :
- d. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) dengan spesifikasi :
 - Merk :
 - Type :
 - Jenis :
 - Tahun Pembuatan :
 - Isi Silinder :
 - Warna :
 - No. Rangka :
 - No. Mesin :

sebagai jaminan atas pengembalian kerugian negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp.,- (.....).

2. Bahwa barang – barang, hak – hak atas barang, surat berharga, hak – hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :

Jabatan : Panitera/Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan

Dengan disaksikan oleh :

- a. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :

- Jabatan : Wakil Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan
- b. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Urusan Umum
Unit Kerja : Pengadilan
3. Menjamin bahwa barang – barang, hak – hak atas barang, surat berharga, hak – hak atas tagihan tersebut pada butir 1 (satu) diatas, adalah benar – benar milik/hak saya pribadi yang sudah serta tidak dalam sengketa dan tidak terdapat beban – beban lainnya.
 4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan kerugian negara seluruhnya, maka barang – barang, hak – hak atas barang, surat berharga, hak – hak atas tagihan tersebut pada butir 1 (satu) diatas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini
 5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 (empat) diatas ternyata kurang dari jumlah kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
 6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 (empat) diatas ternyata melebihi kekurangan perbendaharaan/kerugian negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya – biaya yang dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
 7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian negara ini, tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Penyerahan Jaminan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Yang menerima jaminan,
Panitera / Sekretaris
Pengadilan

TANDA TANGAN + STEMPEL

NIP.

Saksi – Saksi: 1.

2.

..... 20.....
Yang menyerahkan jaminan,

TANDA TANGAN DIATAS
MATERAI Rp. 6.000,-

NIP.

**LAMPIRAN VI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2013

Contoh Surat Kuasa Untuk Melelang

KOP SURAT PENGADILAN

SURAT KUASA UNTUK MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Tempat tinggal :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Tempat tinggal :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama negara (Ketua Mahkamah Agung RI) dalam melakukan :

----- KHUSUS -----

untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang – barang, hak – hak atas barang, surat berharga, hak – hak atas tagihan, yaitu sesuai dengan Surat Penyerahan Jaminan tanggal

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

Yang menerima kuasa,
 Panitera / Sekretaris
 Pengadilan

TANDA TANGAN + STEMPEL

NIP.

....., 20

Yang memberi kuasa,

TANDA TANGAN DIATAS
 MATERAI Rp. 6.000,-

NIP.

**LAMPIRAN VII
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013**

Contoh Surat Kuasa Pemotongan Gaji

KOP SURAT PENGADILAN

SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Tempat tinggal :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melakukan pemotongan langsung atas penghasilan tetap saya berupa gaji sebesar Rp.- (.....) setiap bulannya selama (.....) bulan, terhitung dari bulan tahun sampai dengan bulan tahun, guna pembayaran kerugian negara yang menjadi tanggungjawab saya melalui Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423922 – Pendapatan Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara, beserta Fotocopy NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) atau Bukti pemotongan angsuran melalui SPM yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran (melalui pemotongan gaji), dengan fotocopy bukti pembayaran angsuran dikirim ke Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi setiap bulannya.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

Yang menerima kuasa,
Bendahara Pengeluaran/
Pembuat Daftar Gaji
Pengadilan

Rp. 6.000,-

TANDA TANGAN + STEMPEL

NIP.

....., 20.....
Yang memberi kuasa,

TANDA TANGAN DIATAS MATERAI

NIP.

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 3 TAHUN 2013
 TANGGAL : Agustus 2013

DAFTAR KERUGIAN NEGARA
 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SATUAN KERJA : PENGADILAN

No	Nama Bendahara	No.Tgl SKTJM/SK.Pembebanan	Uraian Kasus/Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Negara (Rp.)	Jumlah Pembayaran/A ngsuran s.d bulan (Rp.)	Sisa Kerugian (Rp.)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Keterangan
JUMLAH				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	

Mengetahui :

Ketua Pengadilan

(_____)

NIP.

..... 20

Panitera/Sekretaris Pengadilan

(_____)

NIP.